

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa pada bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada kantor pemerintahan kota Medan. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu : Pemahaman individu dan penerapan sistem prosedur pengendalian berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) adalah  $5,776 > 2,034$ .
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial penerapan sistem prosedur pengendalian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) adalah  $0,157 < 2,034$ .
3. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman individu dan penerapan sistem prosedur pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ )  $17,156 > 3,294$  dan berdasarkan nilai signifikan ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti menerima  $H_a$ .

4. Hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan *adjusted R Square* sebesar 0.487 yang berarti bahwa variabel pemahaman individu dan penerapan sistem prosedur pengendalian dapat menjelaskan variabel *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar 51,7%, dan selebihnya sebesar 48,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

## 5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini adalah pada pengumpulan data, kerangka sampel yang terbatas hanya pada aparat di bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada kantor pemerintah kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey melalui kuesioner, sehingga kesimpulan mengenai faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa pada bagian ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada kantor pemerintah kota Medan tidak terpotret secara mendalam berdasarkan realitas yang ada di lapangan dan hasilnya juga kemungkinan akan berbeda apabila dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden yang dituju. Melalui pendekatan wawancara (tatap muka langsung) dengan objek penelitian mungkin akan terpotret kondisi lain yang lebih rinci dari faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa.

## 5.3 Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk penelitian ini adalah :

1. Peneliti berikutnya dapat meningkatkan data penelitian setidaknya tidak hanya

satu bagian pada kantor pemerintah kota Medan saja yang diteliti agar dapat dilakukan pengeneralisasi hasil penelitian secara lebih luas. Hal ini penting mengingat instansi pemerintah saat ini banyak menjadi sorotan karena kasus penyelewengan (*fraud*) yang terjadi. Sehingga, secara perlahan kasus-kasus terkait tindak pidana *fraud* semakin berkurang dan sistem pengadaan barang/jasa diseluruh bagian yang ada di instansi pemerintahan di Indonesia semakin lebih membaik.

2. Peneliti berikutnya dapat menguji penelitian serupa dengan menambah *variable independent* yang belum dibahas oleh peneliti seperti tidak hanya berfokus pada proses pengadaan saja, tetapi juga fokus kepada proses pelaksanaannya.
3. Dalam mencegah tindak pidana *fraud* pengadaan barang/jasa, diharapkan ada pelatihan khusus bagi para pegawai terkait dengan pemahaman tentang resiko *fraud*, dan pegawai akan lebih paham tentang apa dan bagaimana seharusnya tugas yang dilaksanakan. Sehingga kasus-kasus terkait tindak pidana *fraud* semakin berkurang bahkan teratasi secara menyeluruh.

#### **5.4 Implikasi**

Walaupun kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian telah diungkapkan di atas, namun kita perlu menilai implikasi penelitian atas kejadian-kejadian saat ini yang dapat mempengaruhi pegawai pemerintah tentang penelitian *fraud* pengadaan barang/jasa masa depan. Telaah dari berbagai studi *fraud* pengadaan barang/jasa mengindikasikan bahwa banyaknya kasus-kasus pada instansi

pemerintah, menunjukkan pentingnya pemahaman pegawai pemerintah untuk mengurangi *fraud* pengadaan barang/jasa yang diharapkan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY